

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Pada bab ini peneliti akan menyampaikan kesimpulan yang peneliti dapatkan dari hasil analisis mengenai pencitraan Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo pasca mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, setelah melakukan analisis teks dan analisis konteks pada SKH Kedaulatan Rakyat pada bab sebelumnya. Kesimpulan ini akan menjawab rumusan masalah yang disampaikan pada bab 1, yaitu bagaimanakah SKH Kedaulatan Rakyat membingkai (*frame*) sosok Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo terkait berita pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY.

Ada tiga buah *frame* penokohan mengenai Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo yang penulis dapatkan dari hasil analisis, yaitu :

1. Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo dicitrakan positif setelah mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY. Keputusan GBPH Prabukusumo cukup mengagetkan pengurus Partai Demokrat dan masyarakat Yogyakarta, selain itu keputusan GBPH Prabukusumo untuk mengundurkan diri juga membuat beberapa pengurus Partai Demokrat kecewa dengan keputusan tersebut. akan tetapi juga Hal ini muncul dalam judul yang dibuat SKH Kedaulatan Rakyat edisi 11 Desember 2010 “PD Sesalkan Mundurnya Prabukusumo”. Masih berhubungan dengan kekecewaan Partai Demokrat, SKH Kedaulatan Rakyat menampilkan judul berita pada edisi 12 Desember 2010 “ **KELUARNYA GBPH PRABUKUSUMO DARI PD ANAS MENYESALKAN, TAPI MENGHORMATI**”. Pada berita ini digambarkan kekecewaan Partai Demokrat atas keputusan GBPH Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat, hal ini

dikarenakan GBPH Prabukusumo dianggap terlalu terburu-buru untuk keluar dari Partai Demokrat jika alasannya terkait dengan konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY.

2. Keputusan GBPH Prabukusumo untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat dinilai sudah tepat. Hal ini berarti sikap GBPH Prabukusumo yang pro rakyat terkait dengan Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY dan menjaga harkat dan martabat Sultan HB IX. SKH Kedaulatan Rakyat tampaknya melihat permasalahan ini dikarenakan kesalahan dari Partai Demokrat yang tidak mendukung Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY, dan dalam hal ini GBPH Prabukusumo merasa dikhianati oleh Partai Demokrat yang berjanji akan mendukung keistimewaan DIY namun pada akhirnya malah tidak mendukung Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY.

3. *Frame* GBPH Prabukusumo yang peneliti dapatkan dari penelitian ini adalah mundurnya GBPH Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus keluar dari Partai Demokrat merupakan langkah beliau untuk pindah ke partai politik lain yang lebih pro rakyat dan lebih menguntungkan, sebab kondisi Partai Demokrat saat ini dinilai sudah merosot dan tidak menguntungkan lagi, banyak politisi Partai Demokrat yang tersandung kasus korupsi.

SKH Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar lokal tertua dan terbesar di wilayah DIY sehingga tak heran jika memiliki pembaca terbanyak di Yogyakarta, oleh karena itu peristiwa mundurnya GBPH sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY memiliki nilai berita yang cukup besar untuk diberitakan SKH Kedaulatan Rakyat. Peneliti mendapatkan hasil ini dari hasil wawancara dengan wartawan senior SKH Kedaulatan Rakyat yaitu Bapak Adhisupo. Dari wawancara itu didapatkan hasil bahwa yaitu SKH Kedaulatan Rakyat merupakan surat kabar yang lahir, tumbuh dan berkembang di Yogyakarta, sehingga SKH Kedaulatan Rakyat itu identik dengan Yogyakarta, Yogyakarta itu identik dengan Keraton yang dipimpin oleh Sri Sultan HB,

jadi tidak dapat dipisahkan antara keraton, SKH Kedaulatan Rakyat dan masyarakat Yogyakarta. Sehingga kalau keraton terusik tentu saja media terutama SKH Kedaulatan Rakyat juga terusik dan akan memberitakan terdepan.

GBPH Prabukusumo bukan hanya merupakan sosok kerabat Keraton Yogyakarta, yaitu adik kandung dari Sultan HB X namun juga sebagai sosok seorang tokoh masyarakat yang disegani di Yogyakarta. Peneliti juga melihat bahwa SKH Kedaulatan Rakyat cenderung mendukung keputusan GBPH Prabukusumo yang memilih untuk mundur sebagai Ketua DPD Partai Demokrat dan sekaligus keluar sebagai kader Partai Demokrat demi memperjuangkan keistimewaan di Yogyakarta. Sebab notabene sebagai surat kabar terbesar di Yogyakarta, SKH Kedaulatan Rakyat pro rakyat dengan mendukung RUUK DIY dengan penetapan gubernur dan wakil gubernur di DIY.

SKH Kedaulatan Rakyat menyadari bahwa mempunyai peranan penting dalam menyampaikan informasi yang tepat bukan hanya kepada masyarakat Yogyakarta, akan tetapi juga bagi pihak Pemerintah Pusat dan Daerah serta stakeholder yang mempunyai kepentingan. Oleh karena itu SKH Kedaulatan Rakyat berusaha tetap menyampaikan informasi yang berimbang.

Kesimpulan yang penulis dapatkan dari hasil analisis teks maupun konteks dengan analisis model Zhongdang Pan dan Gerald Kosicki, menggambarkan bahwa dalam pemberitaannya SKH Kedaulatan Rakyat membingkai sosok seorang Gusti Bendoro Pangeran Haryo Prabukusumo pasca mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat tetap positif.

B. SARAN

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dibuat oleh peneliti ini masih jauh dari sempurna, bahkan masih memiliki banyak kelemahan dan kekurangan dalam proses penelitian. Ketika meneliti teks berita mengenai peristiwa ini terkadang peneliti mendapatkan kesulitan, selain itu peneliti juga mungkin masih memiliki kekurangan dalam menarik frame media pada analisis teks. Tidak hanya itu, dalam melakukan analisis konteks peneliti juga menemukan kesulitan karena ada beberapa pertanyaan yang seharusnya dapat dijawab oleh narasumber sehingga lebih membantu penelitian ini namun tidak dapat terjawab. Hal ini berkaitan dengan masa objek berita yang diteliti yaitu bulan Desember 2010, atau sekitar 2 tahun yang lalu sehingga narasumber yang diwawancarai sudah tidak ingat mengenai isi dari berita itu sendiri.

Dalam penelitian ini, peneliti juga ingin memberikan saran kepada SKH Kedaulatan Rakyat dalam pemberitaan kedepannya diharapkan SKH Kedaulatan Rakyat mampu menampilkan berita yang lebih obyektif lagi.

Minggu, 05 Desember 2010
Prabukusumo Siap Mundur Dari Demokrat Jika...

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTUAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Objek Wacana : Pernyataan Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat Roy Suryo yang menyatakan bahwa Prabukusumo berencana akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY menyusul perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah. Satu poin yang menjadi perdebatan alot terkait mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>Pelibat Wacana : GBPH H Prabukusumo SPsi</p> <p>Pelantun</p>	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini: <u>Pernyataan Roy Suryo terkait rencana pengunduran diri GBPH Prabukusumo dari dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 1 hingga 3, paragraf 1 yang menampilkan pernyataan dari Roy Suryo terkait rencana pengunduran diri Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY. Rencana pengunduran diri tersebut menyusul perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah terkait mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur di DIY. Paragraf 2 menyatakan Prabukusumo baru akan mundur hanya jika sikap partai nantinya tidak sejalan dengan dengan keinginan warga Yogyakarta. Sedangkan paragraf 3 berisi pernyataan Roy Suryo terkait alasan pengunduran diri Prabukusumo, "Kalau aspirasi dari partai tidak sejalan akan</p>	<p>Lead : Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, GBPH Prabukusumo, kemarin menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY. Roy mengungkapkan pernyataan tersebut diutarakan Prabukusumo menyusul perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah. Satu poin yang menjadi perdebatan alot terkait mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p> <p>Penutup : Prabukusmo menjabat sebagai Ketua DPD PD DIY sejak 2003. Saat itu partai masih di bawah kepemimpinan Hadi</p>	<p>Judul Prabukusumo Siap Mundur Dari Demokrat Jika...</p> <p>Keyword GPBH Prabukusumo, menyatakan berencana akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY.</p> <p>Rencana pengunduran diri tersebut terkait perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur (paragraf 1).</p> <p>Prabukusumo baru akan mundur hanya jika sikap partai nantinya tidak sejalan dengan dengan keinginan warga Yogyakarta. (paragraf 3)</p> <p>Visual Image Ada foto Prabukusumo</p> <p>CATCHPRASES</p> <ul style="list-style-type: none"> • "Satu poin yang menjadi <u>perdebatan alot</u> terkait mekanisme pemilihan gubernur dan

<p>Wacana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartawan kepentingan wartawan ini untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang pengunduran diri Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY. Roy Suryo, Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat (narasumber ini digunakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dengan alasan Roy Suryo merupakan Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat yang juga merupakan kader Partai Demokrat yang berasal dari Yogyakarta, sehingga dinilai cukup paham terkait masalah RUUK DIY. 	<p>mengundurkan diri. Itu pun baru akan, dan itu pun kalau terbukti bahwa PD seperti yang dituduhkan tidak sesuai dengan aspirasi warga.”</p> <p>Jenis Wacana Penggambaran Prabukusumo oleh wartawan/redaktur:</p> <p><u>Dari judul :</u> Prabukusumo Siap Mundur Dari Demokrat Jika...</p> <p><u>Dari Lead :</u> Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat Roy Suryo mengatakan, adik Sri Sultan Hamengkubuwono X, GPBH Prabukusumo, kemarin menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY. Roy mengungkapkan pernyataan tersebut diutarakan Prabukusumo menyusul perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah. Satu poin yang menjadi perdebatan alot terkait mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur.</p>	<p>Utomo. Pada pemilu 2009 lalu, Prabukusmo berjasa mengantarkan PD meraih kemenangan di Yogyakarta.</p> <p><i>Placement</i> yang menyatakan rencana Prabukusumo yang akan mengundurkan diri dari Partai Demokrat terdapat pada paragraf 1 , ini menunjukkan bahwa hal tersebut ingin ditonjolkan oleh wartawan.</p> <p><i>Placement</i> yang menyatakan alasan pengunduran diri Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat, ditunjukkan pada paragraf 2 hingga 3, disini wartawan memberikan space yang cukup banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan rencana pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat ini ditonjolkan oleh wartawan.</p> <p>Placement --- Paragraf, Halaman Depan (<i>Headline</i>) <i>Placement</i> mengenai citra positif Prabukusumo terkait rencana pengunduran dirinya sebagai</p>	<p>wakil gubernur.” (paragraf 2) Kata ‘perdebatan alot’ dapat diartikan perdebatan yang sulit untuk menemukan kesepakatan bersama. Dalam hal ini yang menjadi masalah adalah RUUK DIY terkait dengan mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur, Prabukusumo menghendaki bahwa penetapan untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur, sedang pemerintah menghendaki melakukan pemilihan untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur yang akan menjabat di DIY.</p> <ul style="list-style-type: none"> “ Prabukusmo berjasa mengantarkan PD meraih kemenangan di Yogyakarta.”(paragraf 7). Kata ‘mengantarkan PD meraih kemenangan’ menunjukkan bahwa Prabukusumo telah berjasa dalam kemenangan PD di wilayah DIY.
--	---	--	--

	<p>Narasumber 1 :</p> <p>Roy Suryo, Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat menyatakan rencana pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat jika sikap partai nantinya tidak sejalan dengan dengan keinginan warga Yogyakarta. Selain itu, RUUK yang berisi mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung, disetujui menjadi Undang-undang.</p>	<p>Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada berita edisi 5 Desember 2010 terdapat pada:</p> <p>Paragraf 3 (Prabukusumo baru akan mundur hanya jika sikap partai nantinya tidak sejalan dengan dengan keinginan warga Yogyakarta. Selain itu, RUUK yang berisi mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur dipilih langsung, disetujui menjadi Undang-undang.)</p> <p>Paragraf 7 Prabukusmo menjabat sebagai Ketua DPD PD DIY sejak 2003. Saat itu partai masih di bawah kepemimpinan Hadi Utomo. Pada pemilu 2009 lalu, <u>Prabukusmo berjasa mengantarkan PD meraih kemenangan di Yogyakarta.</u>)</p>	
<p>Prabukusumo berencana akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY jika sikap Partai Demokrat nantinya tidak sejalan dengan keinginan warga Yogyakarta terkait perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur.(paragraf 2 dan 3).</p>		<p>SKH Kedaulatan Rakyat ingin menunjukkan bahwa Prabukusumo yang telah berjasa membawa Partai Demokrat meraih kemenangan di DIY, berencana mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY jika PD terbukti tidak sesuai dengan aspirasi warga Yogyakarta terkait Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.</p>	

Roy Suryo selaku Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat mengatakan, bahwa GPBH Prabukusumo, menyatakan akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD PD DIY jika sikap partai tidak sejalan dengan keinginan warga Yogyakarta terkait perdebatan soal Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY yang diusulkan pemerintah tentang mekanisme pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Namun terkait dengan rencana pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat, Roy Suryo tetap optimis bahwa dengan keluarnya Prabukusumo dari PD tidak berarti ada perpecahan di tubuh Partai Demokrat, bahkan dia menjamin Demokrat akan semakin solid.



Berita II (9 Desember 2010)
Menjaga Harkat dan Martabat Sultan HB IX
Prabukusumo Mundur dari PD

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTUAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Objek Wacana : Pernyataan Prabukusumo atas pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY, dengan alasan menjaga harkat dan martabat Sri Sultan HB IX juga karena adanya perbedaan pemahaman terkait dengan RUUK DIY.</p> <p>Pelibat Wacana : GBPH H Prabukusumo SPsi</p> <p>Pelantun Wacana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartawan kepentingan wartawan ini untuk memberikan informasi kepada khalayak tentang pengunduran diri Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY GBPH Prabukusumo Andi Mallarangeng Sekretaris Dewan Pembina Partai 	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini: <u>Pernyataan Prabukusumo yang resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 1 dan 2, paragraf 1 yang menampilkan pernyataan dari Prabukusumo yang menyatakan mundur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) Provinsi DIY, sekaligus keluar dari keanggotaan Partai Demokrat. Paragraf 2 menyatakan bahwa Prabukusumo akan menyerahkan jabatan dan kartu tanda anggota (KTA) kepada DPD PD Provinsi DIY.</p> <p><u>Alasan mundurnya Prabukusumo dari kepengurusan DPD Partai Demokrat Provinsi DIY.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 3 dan 4, Paragraf 3 disebutkan bahwa ada perbedaan pemahaman tentang Rancangan Undang-Undang Keistimewaan (RUUK) DIY antara sikap politik</p>	<p>Lead : GBPH H Prabukusumo SPsi akhirnya mundur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi DIY, sekaligus keluar dari keanggotaan Partai Demokrat. Pernyataan mundur adik Sri Sultan HB X ini disampaikan di Hotel Bifa Yogyakarta seusai pamitan kepada pengurus DPD PD yang lainnya, Rabu(8/12) malam.</p> <p>Penutup : Terkait hal itu, Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat Andi Mallarangeng mempersilahkan adik kandung Sultan Hamengku Buwono X itu keluar dari Partai</p>	<p>Judul Menjaga Harkat dan Martabat Sultan HB IX</p> <p>Prabukusumo Mundur dari PD</p> <p>Keyword Pengunduran diri Prabukusumo dikarenakan menjaga harkat dan martabat Sri Sultan HB IX juga karena adanya perbedaan pemahaman terkait dengan RUUK DIY.</p> <p>Visual Image Ada gambar Prabukusumo yang sedang memperlihatkan kartu tanda keanggotaannya di Partai Demokrat</p> <p>CATCHPRASES</p> <ul style="list-style-type: none"> “Saya <u>mundur</u> untuk membela dan <u>menjaga harkat dan martabat ayahanda.....</u>” (paragraf 4) <p>Kata ‘harkat’ menurut Kamus Besar Bahasa</p>

<p>Demokrat (narasumber ini digunakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dengan alasan Andi Mallarangeng merupakan Sekretaris Dewan Pembina Partai Demokrat yang dinilai mempunyai kompetensi untuk memberikan tanggapan atas pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat)</p>	<p>Prabukusumo dengan kebijakan politik DPP Partai Demokrat. paragraf 4 menyebutkan Prabukusumo mundur untuk membela dan menjaga harkat dan martabat ayahanda saya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan Presiden Soekarno, yaitu penetapan bukan pemilihan. “Karena tidak sejalan dengan DPP maka sebelum dipecat saya memilih mengundurkan diri”.</p> <p><u>Sejarah berdirinya DIY dan NKRI.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 5 yang menyebutkan bahwa DIY dan NKRI berdiri atas dasar sumber hukum diantaanya amanat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945, Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945, UUD 1945, peraturan pemerintah dan daerah tentang keistimewaan DIY.</p> <p>Jenis Wacana Penggambaran Prabukusumo oleh wartawan/redaktur:</p>	<p>Demokrat. Menurutnya tidak ada larangan untuk keluar dari partai. “Itu hak pribadi masing-masing,” kata Andi.(paragraf 7)</p> <p>Placement yang menyatakan Prabukusumo resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat terdapat pada paragraf 1 dan 2 diawal tulisan, ini menunjukkan bahwa hal tersebut ingin ditonjolkan oleh wartawan. Placement yang menyatakan alasan pengunduran diri Prabukusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY dan sekaligus keluar dari keanggotaan Partai Demokrat, ditunjukkan pada paragraf 3 hingga 6, disini wartawan memberikan space yang cukup banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa alasan pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat ini ditonjolkan oleh wartawan.</p>	<p>Indonesia mengandung arti derajat (kemuliaan dsb); taraf; mutu; nilai; harga.</p> <p>Sedangkan kata ‘martabat’ berarti tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Terus terang saya sakit hati dengan komentar.....” (paragraf 6). Kata sakit hati menunjukkan bahwa Prabukusumo tersinggung atas komentar-komentar.
--	--	--	---

	<p><u>Dari judul :</u></p> <p>Menjaga Harkat dan Martabat Sultan HB IX</p> <p>Prabukusumo Mundur dari PD.</p> <p><u>Dari Lead :</u></p> <p>GBPH H Prabukusumo SPsi akhirnya mundur sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD Provinsi DIY, sekaligus keluar dari keanggotaan Partai Demokrat. Pernyataan mundur adik Sri Sultan HB X ini disampaikan di Hotel Bifa Yogyakarta seusai pamitan kepada pengurus DPD PD yang lainnya, Rabu(8/12) malam.</p> <p>Narasumber 1 :</p> <p>GBPH H Prabukusumo SPsi</p> <p>Prabukusumo menyatakan pengunduran dirinya dari Partai Demokrta demi membela dan menjaga harkat dan martabat ayahanda saya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan Presiden Soekarno, yaitu penetapan untuk</p>	<p>Placement</p> <p>--- Paragraf, Halaman Depan (<i>Headline</i>)</p> <p>Placement</p> <p>mengenai citra positif Prabukusumo terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada berita edisi 9 Desember 2010 terdapat pada:</p> <p>Paragraf 4 (<u>Saya mundur untuk membela dan menjaga harkat dan martabat ayahanda saya Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Sri Paduka Paku Alam VIII dan Presiden Soekarno, yaitu penetapan bukan pemilihan. Karena tidak sejalan dengan DPP maka sebelum dipecat saya memilih mengundurkan diri</u>)</p> <p>Paragraf 6 (“Terus terang <u>saya sakit hati dengan komentar-komentar yang akan menghilangkan pengorbanan Sri Sultan HB IX dan Paku Alam VIII.....</u>”)</p>	
--	---	---	--

	<p>DIY bukan pemilihan. (paragraf 4)</p> <p>Narasumber 2 : Andi Mallarangeng selaku Sekretaris Dewan Pembinaan Partai Demokrat Menurutnya tidak ada larangan untuk keluar dari partai. “Itu hak pribadi masing-masing,” kata Andi</p>		
<p>Prabukusumo resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY dikarenakan sudah tidak sepehaman/ satu pemikiran lagi dengan Partai Demokrat terkait dengan RUUK DIY (paragraf 3). Karena Prabukusumo merasa berkewajiban menjaga harkat dan martabat ayahanda-nya yang tidak lain adalah Sri Sultan HB IX yang dengan sadar dan ikhlas menyerahkan Keraton dan Kadipaten kepada NKRI.</p>	<p>SKH Kedaulatan Rakyat ingin menunjukkan bahwa Prabukusumo rela mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY dan sekaligus keluar dari keanggotannya di Partai Demokrat demi menjaga harkat dan martabat Sultan HB IX terkait dengan keistimewaan di DIY.</p>		
<p>Prabukusumo konsisten dalam memperjuangkan keistimewaan di DIY dengan mendukung adanya penetapan; sama dengan apa yang telah diperjuangkan oleh Sultan HB IX, ayahanda-nya dulu.</p>			

ANALISIS BERITA III (10 Desember 2010)
Soal RUUK, DPRD DIY Ajak Rakyat Ikut Sidang Terbuka

Kerabat Kraton Satu Suara

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTUAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Objek Wacana : pernyataan Sri Sultan Hamengku Buwono X bahwa keputusan Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat merupakan bukti bahwa kerabat Kraton Yogyakarta mempunyai integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY.</p> <p>Pelibat Wacana : GBPH H Prabukusumo SPsi</p> <p>Pelantun Wacana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartawan (kepentingan wartawan ini untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa kerabat Kraton Yogyakarta mempunyai 	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini: <u>Pernyataan Sri Sultan HB X bahwa keluarga Kraton Yogyakarta mempunyai integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 1 hingga 3. Paragraf 1 menyebutkan pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat menunjukkan bahwa keluarga Kraton Yogyakarta punya integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY. Paragraf 2 yang menampilkan pernyataan Sri Sultan HB X bahwa meskipun dalam kiprah politik keluarga keraton berbeda partai politik, namun menghadapi masalah RUUK DIY tetap punya integritas yang sama, mereka (keluarga keraton Yogyakarta) tidak hanya kompak, tapi juga punya pribadi.</p> <p><u>Pengunduran diri GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat ternyata</u></p>	<p>Lead : Pengunduran diri GBPH H PrabukusumoSPsi dari jabatannya sebagai Ketua DPD Patai Demokrat (PD) DIY menunjukkan bahwa keluarga Kraton Yogyakarta punya integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY, meski berbeda partai politik, namun menyangkut keistimewaan DIY, kerabat Kraton Yogya tetap satu suara.</p> <p>Penutup : Untuk menentukan sikap terhadap Keistimewaan DIY, DPRD DIY akan menggelar Sidang Paripurna Terbuka, Senin (13/12) pukul 13.00. menurut Ketua DPRD DIY, Yoke Indra Agung Laksana, rapat ini terbuka bagi umum. Masyarakat</p>	<p>Judul Soal RUUK, DPRD DIY Ajak Rakyat Ikut Sidang Terbuka</p> <p>Kerabat Kraton Satu Suara</p> <p>Keyword Keluarga Kraton Yogyakarta mempunyai integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY.</p> <p>Meskipun berbeda partai politik namun berusaha untuk membangun integritas yang sama.</p> <p>Dan terkait dengan pengunduran dirinya, Prabukusumo tidak pernah mengajak atau mempengaruhi anggota dan pengurus PD untuk melakukan hal serupa (mengundurkan diri).</p> <p>CATCHPRASES</p> <ul style="list-style-type: none"> “punya <u>integritas</u> yang sama....” (paragraf 1).kata

<p>integritas yang sama/ tetap satu suara menyangkut masalah keistimewaan DIY.)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sri Sultan Hamengku Buwono X (Beliau merupakan Raja Kraton Yogyakarta dan sekaligus kakak kandung dari Prabukusumo, sehingga dinilai berkompeten untuk mewakili keluarga Kraton Yogyakarta dalam memberikan tanggapan terkait pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat) • GBPH Prabukusumo • Anas Urbaningrum Ketua Umum 	<p><u>juga diikuti oleh dua pengurus DPD Partai Demokrat DIY.</u> Tampak pada paragraf 5 yang menyebutkan bahwa pengunduran diri Prabukusumo diikuti dua pengurus DPD Partai Demokrat DIY. dalam paragraf ini disertakan pula disertakan pula pernyataan dari Prabukusumo yang merasa tidak pernah mengajak atau mempengaruhi anggota dan pengurus Partai Demokrat lainnya untuk keluar dari Partai Demokrat.</p> <p><u>Perkembangan draf Rancangan Undang-Undang Keistimewaan DIY.</u> Ditunjukkan pada paragraf 8 yang menyebutkan bahwa sebelum minggu ini berakhir, RUU tersebut sudah akan sampai ke DPR-RI. Dan di pertegas lagi pada kalimat selanjutnya yang menyatakan bahwa draf RUUJ DIY tersebut Sudah diserahkan ke Presiden melalui sekretariat Negara kemarin.</p> <p><u>Akan diadakannya Sidang Paripurna Terbuka oleh DPRD DIY untuk menentukan sikap terhadap Keistimewaan DIY.</u></p>	<p>dipersilahkan melihat proses pengambilan suara DPRD DIY.</p> <p>Placement --- Paragraf, Halaman Depan (Headline) Placement mengenai citra positif Prabukusumo terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada berita edisi 10 Desember 2010 terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paragraf 1 (Pengunduran diri GBPH H PrabukusumoSPsi dari jabatannya sebagai Ketua DPD Patai Demokrat (PD) DIY menunjukkan bahwa <u>keluarga Kraton Yogyakarta punya integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY.</u> <u>Meski berbeda partai politik, namun menyangkut keistimewaan DIY, kerabat Kraton Yogya tetap satu suara.)</u> • Paragraf 	<p>integritas menurut KBBI berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yg utuh atau bulat, atau dapat diartikan juga menggabungkan; menyatukan</p> <ul style="list-style-type: none"> • “keluarga Kraton Yogya tetap <u>satu suara.</u>” (paragraf 1). Kata satu suara menunjukkan bahwa keluarga Kraton Yogyakarta mempunyai pendapat dan sikap yang sama. • “Sekarang saya sudah bebas, mau <u>bergerak</u> apapun itu hak saya.....” (paragraf 4). Kata bebas bergerak mengandung arti bahwa sudah bebas untuk melakukan apa saja karena sudah tidak terikat dengan suatu peraturan. • “Karena nanti akan menjadi <u>beban moral,</u>” (paragraf 5). Kata beban moral dapat diartikan sebagai tanggung jawab, artinya jika Prabukusumo membujuk kedua Partai Demokrat tersebut untuk mengundurkan diri seperti dirinya, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab Prabukusumo.
---	---	--	---

<p>DPP Partai Demokrat (kepentingan dari narasumber ini karena merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dimana Prabokusumo bernaung, sehingga dinilai mempunyai kompetensi untuk memberikan tanggapan untuk mewakili Partai Demokrat atas pengunduran diri Prabokusumo dari Partai Demokrat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pramono Anung Wibowo : Wakil Ketua DPR RI • Prof Dr Djohermansyah Djohan :Dirjen Otda Kemdragri (KR menggunakan beliau menjadi narasumber sebab sebagai Dirjen Otda Kemdragri dinilai cukup 	<p>Ditunjukkan pada paragraf 9 yang juga merupakan paragraf terakhir dalam berita ini. Yang menyebutkan bahwa DIY akan menggelar Sidang Paripurna Terbuka, Senin (13/12) pukul 13.00 Untuk menentukan sikap terhadap Keistimewaan DIY dan mengajak masyarakat Yogyakarta untuk melihat proses pengambilan keputusan DPRD DIY tersebut.</p> <p>Jenis Wacana Penggambaran Prabokusumo oleh wartawan/redaktur:</p> <p><u>Dari judul :</u></p> <p>Soal RUUK, DPRD DIY Ajak Rakyat Ikut Sidang Terbuka</p> <p>Kerabat Kraton Satu Suara</p> <p><u>Dari Lead :</u></p> <p>Pengunduran diri GBPH H PrabokusumoSPsi dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) DIY menunjukkan bahwa keluarga Kraton Yogyakarta punya integritas yang sama</p>	<p>2(“Itulah integritas kami. Yang penting bagi saya kan itu. <u>Bukan kami bersaudara itu berbeda, tapi kami punya integritas yang sama menghadapi masalah. Tidak hanya kompak, tapi kita punya pribadi,”</u> kata Raja Kraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono (HB) X kepada wartawan menanggapi pengunduran diri GBPH H Prabokusumo sebagai Ketua DPD Partai Demokrat (PD) DIY di Kepatihan, Kamis (9/12)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paragraf 3 (Ditanya apakah pengunduran diri Prabokusumo menunjukkan bahwa Kraton Yogya sudah satu suara, Sultan mempersilahkan masyarakat untuk menilai. “Ya dilihat sendiri. <u>Dengan berbeda politik saja kita membangun integritas</u>,” kata Sultan.) • Paragraf 5 (Pengunduran diri Prabokusumo juga diikuti dua pengurus 	
--	--	--	--

<p>berkompeten untuk menjelaskan perkembangan RUUK DIY)</p> <p>• Yoeke Indra Agung Laksana : Ketua DPRD DIY</p>	<p>dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY. meski berbeda partai politik, namun menyangkut keistimewaan DIY, kerabat Kraton Yogya tetap satu suara.</p> <p>Narasumber 1</p> <p>Sri Sultan Hamengku Buwono X</p> <ul style="list-style-type: none"> • “Itulah integritas kami. Yang penting bagi saya kan itu. Bukan kami bersaudara itu berbeda, tapi kami punya integritas yang sama menghadapi masalah. Tidak hanya kompak, tapi kita punya pribadi” (paragraf 2) • Ditanya apakah pengunduran diri Prabukusumo menunjukkan bahwa Kraton Yogya sudah satu suara, Sultan mempersilahkan masyarakat untuk menilai. “Ya dilihat sendiri. Dengan berbeda politik saja kita membangun integritas,” kata Sultan. (paragraf 3) <p>Narasumber 2</p> <p>Anas Urbaningrum (Ketua Umum DPP Partai Demokrat)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keputusan Prabukusumo ini tak 	<p>DPD PD lainnya, Drs.Faraz Umayya MM (wakil ketua bidang IX) serta Lulu D Budihardjo (wakil sekretaris bidang IX). Namun adik Sri Sultan HB X itu <u>menandaskan, tidak pernah mengajak atau mempengaruhi anggota dan pengurus PD untuk melakukan hal serupa (mengundurkan diri).</u> “Saya tidak mengajak siapapun. Karena nanti akan menjadi beban moral, ” ujarnya.)</p>	
---	--	---	--

	<p>urung membuat Ketua Umum DPP PD Anas Urbaningrum terkaget-kaget dan masih menunggu perkembangan soal kepastian langkah Prabu yang mundur dari Partai Demokrat “Jika benar Mas Prabu mundur dari Partai Demokrat, sebagai sahabat dan Ketua Umum saya menyayangkan. Saya menghormati pilihan politiknya itu,” (paragraf 6)</p>		
<p>Pengunduran diri Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY menunjukkan bahwa keluarga Kraton Yogyakarta mempunyai integritas yang sama dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY. (paragraf 1)</p> <p>Meskipun keluarga Keraton Yogyakarta berbeda partai dalam berpolitik, namun dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY mereka kompak dan punya integritas yang sama.</p>	<p>SKH Kedaulatan Rakyat ingin menunjukkan bahwa meskipun berbeda partai politik dalam menghadapi masalah keistimewaan DIY, keluarga Kraton Yogyakarta mempunyai integritas yang sama. Pengunduran diri Prabukusumo tersebut tidak hanya menunjukkan kekompakan dari keluarga keraton namun juga menunjukkan bahwa keluarga Keraton Yogyakarta mempunyai kepribadian dalam memperjuangkan keistimewaan DIY (paragraf 1), lalu di paragraf 3 muncul pernyataan bahwa dengan berbeda politik saja kita membangun integritas.</p>		
<p>Kedaulatan Rakyat melihat pengunduran diri Prabukusumo dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY ini sebagai bukti bahwa sebagai keluarga dari Keraton Yogyakarta, Prabukusumo memiliki integritas yang sama dengan keluarga keraton lainnya (Sri Sultan HB X) dalam menghadapi masalah keistimewaan di DIY.</p>			

PD Sesalkan Mundurnya Prabukusumo

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTUAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Objek Wacana : Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat. (lead)</p> <p>Pelibat Wacana : GBPH H Prabukusumo SPsi</p> <p>Pelantun Wacana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartawan : kepentingan wartawan ini untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa keputusan Prabukusumo untuk keluar dari Partai Demokrat sangat mengejutkan para petinggi Partai Demokrat. Muhammad Jafar Hafsah, 	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini: <u>Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat.</u> Tampak pada judul dan paragraf 1 hingga 3, paragraf 1 mengungkapkan bahwa Muhammad Jafar Hafsah, Ketua DPP Partai Demokrat menyesalkan keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat, karena mundurnya Prabukusumo dari Partai Demokrat terkesan terburu-buru dan sepihak, tanpa membicarakan terlebih dahulu dengan partai. Kemudian pada paragraf 2, Muhammad Jafar menjelaskan alasan dirinya menyesalkan keluarnya Prabukusumo, "Disesalkan kenapa keluar dari PD hanya karena sebuah ketidakpastian soal RUU keistimewaan Yogyakarta. Dia tergesa-gesa keluar dari PD. Seyogyanya tidak perlu keluar. Prabu harus arif karena tidak ada yang mengancam keluarganya</p>	<p>Lead : Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya adik Sri Sultan HB X GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat. "Kita sesalkan bahwa Prabukusumo keluar dari PD yang terburu-buru. Jangan sepihak dong," kata Jafar di Gedung DPR, Jakarta.</p> <p>Penutup : Prabukusumo adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Demokrat Yogyakarta. Prabu telah keluar dari Partai Demokrat pada Rabu malam (8/12). Ia beralasan, RUU DIY bertentangan</p>	<p>Judul PD Sesalkan Mundurnya Prabukusumo</p> <p>Keyword Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat hanya karena alasan ketidakpastian soal RUU keistimewaan Yogyakarta yang belum ada dan belum dibahas sama sekali.</p> <p>Bila ada keinginan dari Prabukusumo untuk kembali ke Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat akan dengan senang hati untuk menerimanya.</p> <p>Roy Suryo mengaku, keluarnya Prabukusumo akan berpengaruh besar terhadap suara Partai Demokrat pada 2014. "Sangat besar pengaruhnya karena</p>

<p>Ketua DPP Partai Demokrat (kepentingan narasumber ini adalah memberikan tanggapan mengenai mundurnya Gusti Prabu dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY mengingat bahwa narasumber ini merupakan Ketua DPP Partai Demokrat, dimana Prabukusumo bernaung, sehingga dinilai mempunyai kompetensi untuk memberikan tanggapan untuk mewakili Partai Demokrat atas pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat)</p> <ul style="list-style-type: none"> Roy Suryo, anggota DPR RI sekaligus Sekretaris Divisi Pembinaan Anggota DPP Partai Demokrat. (karena narasumber ini berasal dari daerah yang sama dengan Prabukusumo sehingga dianggap mengerti tentang 	<p>atau Sri Sultan. RUU-nya saja belum ada. Sebagai sahabat, saya ingin jangan kaitkan masalah RUU DIY."</p> <p>Paragraf 3 masih memuat pernyataan Jafar yang menyatakan bahwa DPP Partai Demokrat tidak perlu membahas soal keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat karena dia (Prabu) tidak minta izin, tidak ada konfirmasi untuk keluar dari partai. Tidak ada pemberitahuan dan konfirmasi dari Prabu.</p> <p><u>Pengaruh keluarnya Prabukusumo terhadap Partai Demokrat DIY.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 5 hingga paragraf 6. Pada paragraf 5 menampilkan pernyataan Muhammad Jafar yang menyatakan bahwa keluarnya Prabu dari Partai Demokrat tidak akan berpengaruh terhadap suara partai Demokrat pada Pemilu 2014 mendatang. Sedangkan paragraf 6 menampilkan pernyataan anggota DPR RI dari Yogyakarta yaitu Roy Suryo yang berpendapat bahwa keluarnya Prabukusumo akan berpengaruh besar terhadap suara Partai Demokrat pada 2014. "Sangat besar pengaruhnya karena Prabu adalah keluarga</p>	<p>dengan keistimewaan Yogyakarta dan tidak ingin melawan amanat dari Sri Sultan HB IX.</p> <p><i>Placement</i> yang menyatakan Muhammad Jafar Hafshah menyesalkan keluarnya Prabukusumo, terdapat pada paragraf 1 hingga paragraf 4, ini menunjukkan bahwa hal tersebut ingin ditonjolkan oleh wartawan. Disini wartawan memberikan space yang cukup banyak dan tulisan tersebut diletakkan di tempat yang cukup strategis untuk dibaca.</p> <p><i>Placement</i> --- Paragraf, Halaman Depan (<i>Headline</i>) <i>Placement</i> mengenai citra positif Prabukusumo terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi</p>	<p>Prabu adalah keluarga keraton, yang ikut menyumbangkan suara yang signifikan pada Pemilu 2009 lalu. Masyarakat Yogyakarta setia dengan keluarga keraton."</p> <p>RUU DIY bertentangan dengan keistimewaan Yogyakarta dan tidak ingin melawan amanat dari Sri Sultan HB IX.</p> <p>Catchprases</p> <ul style="list-style-type: none"> "Jangan <u>sepihak</u> dong," kata Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (10/12). (paragraf 1). Kata sepihak dapat diartikan bahwa keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat merupakan keputusan Prabukusumo sendiri tanpa mendapat persetujuan dari pihak Partai Demokrat. "...menyumbangkan suara yang signifikan pada Pemilu 2009 lalu..." (paragraf 6). Kata menyumbangkan diartikan dengan memberi, dan biasanya digunakan untuk mengikuti kata benda.
---	---	--	---

<p>RUUK DIY dan keinginan warga Yogyakarta terhadap RUUK DIY sehingga dinilai berkompeten untuk memberikan tanggapan terkait pengunduran diri Prabukusumo dan dampak dari pengunduran diri Prabukusumo terhadap nasib Partai Demokrat di DIY)</p>	<p>keraton, yang ikut menyumbangkan suara yang signifikan pada Pemilu 2009 lalu. Masyarakat Yogyakarta setia dengan keluarga keraton," kata Roy.</p> <p>Jenis Wacana Penggambaran Prabukusumo oleh wartawan/redaktur:</p> <p><u>Dari judul :</u></p> <p>PD Sesalkan Mundurnya Prabukusumo</p> <p><u>Dari Lead :</u></p> <p>Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya adik Sri Sultan HB X GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat. "Kita sesalkan bahwa Prabukusumo keluar dari PD yang terburu-buru. Jangan sepihak dong," kata Jafar di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (11/12).</p>	<p>DIY pada berita edisi 10 Desember 2010 terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Paragraf 6 (...keluarnya Prabukusumo akan berpengaruh besar terhadap suara Partai Demokrat pada 2014. <u>"Sangat besar pengaruhnya karena Prabu adalah keluarga keraton, yang ikut menyumbangkan suara yang signifikan pada Pemilu 2009 lalu. Masyarakat Yogyakarta setia dengan keluarga keraton," kata Roy.</u>) • Paragraf 7 (Prabukusumo adalah Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Demokrat Yogyakarta. Prabu telah keluar dari Partai Demokrat pada Rabu malam (8/12). Ia beralasan, <u>RUU DIY bertentangan dengan keistimewaan Yogyakarta dan tidak ingin melawan amanat dari Sri Sultan HB IX.</u>) 	<p>Namun dalam berita ini menyumbangkan suara dapat diartikan sebagai memberikan andil/pengaruh dalam mendapatkan suara pemilih pada pemilihan umum 2009.</p>
---	---	---	---

	<p>Narasumber 1 :</p> <p>Ketua DPP Partai Demokrat, Muhammad Jafar Hafsah</p> <ul style="list-style-type: none"> • Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya adik Sri Sultan HB X GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat (paragraf 1) • Prabukusumo sebaiknya berpikiran positif dan tidak mengaitkan dengan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang belum ada dan belum dibahas sama sekali. "Disesalkan kenapa keluar dari PD hanya karena sebuah ketidakpastian soal RUU keistimewaan Yogyakarta. Dia tergesa-gesa keluar dari PD. Seyogyanya tidak perlu keluar. Prabu harus arif karena tidak ada yang mengancam keluarganya atau Sri Sultan. RUU-nya saja belum ada. Sebagai sahabat, saya ingin jangan kaitkan masalah RUU DIY," kata Jafar. (paragraf 2) • bila ada keinginan dari Prabukusumo untuk kembali ke Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat akan dengan senang hati untuk menerimanya. "Kita terima kalau Prabu kembali ke Demokrat. 		
--	---	--	--

	Tak ada masalah, kita terbuka," kata dia. (paragraf 4)		
Ketua DPP Partai Demokrat Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat hanya karena alasan ketidakpastian soal RUU keistimewaan Yogyakarta yang belum ada dan belum dibahas sama sekali.	Keputusan mundurnya Prabukusumo dari Partai Demokrat disesalkan oleh Ketua DPP Partai Demokrat, Jafar Hafsah. Dirinya (Jafar Hafsah) menyesalkan keluarnya Prabukusumo terlalu tergesa-gesa dan sepihak. Selain itu disesalkan juga Prabukusumo keluar dari PD dengan alasan RUUK DIY yang belum ada dan belum dibahas sama sekali. Namun bila ada keinginan dari Prabukusumo untuk kembali ke Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat akan dengan senang hati untuk menerimanya.		
<p>KR ingin memperlihatkan bahwa Ketua DPP Partai Demokrat, Muhammad Jafar Hafsah menyesalkan keluarnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat dengan terburu-buru. Menurutnya Prabukusumo sebaiknya berpikiran positif dan tidak mengaitkan dengan RUU Keistimewaan Yogyakarta yang belum ada dan belum dibahas sama sekali. Namun bila ada keinginan dari Prabukusumo untuk kembali ke Partai Demokrat, DPP Partai Demokrat akan dengan senang hati untuk menerimanya. Jafar Hafsah optimis bahwa keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat tidak akan berpengaruh terhadap suara partai Demokrat pada Pemilu 2014 mendatang. Namun pendapat Ketua DPP Partai Demokrat tersebut bertentangan dengan pendapat anggota DPR RI dari Yogyakarta, Roy Suryo yang menyatakan bahwa keluarnya Prabukusumo akan berpengaruh besar terhadap suara Partai Demokrat pada 2014 mengingat bahwa Prabu adalah keluarga keraton, yang ikut menyumbangkan suara yang signifikan pada Pemilu 2009 lalu dan masyarakat Yogyakarta setia dengan keluarga keraton</p>			

KELUARNYA GBPH PRABUKUSUMO DARI PD
ANAS MENYESALKAN, TAPI MENGHORMATI

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTUAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Objek Wacana : Mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat mengejutkan para petinggi Partai Demokrat, bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyesalkan keputusan Gusti Prabu tersebut. (<i>lead</i>)</p> <p>Pelibat Wacana : GBPH H Prabukusumo SPsi</p> <p>Pelantun Wacana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartawan : kepentingan wartawan ini untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa keputusan Prabukusumo 	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini: <u>Partai Demokrat dan Anas Urbaningrum menyesalkan dan menyayangkan namun tetap menghormati keputusan Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 1 hingga 3, paragraf 1 yang menyebutkan bahwa mundurnya GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat (PD) mengejutkan para petinggi parpol tersebut. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyesalkan keputusan GBPH Prabukusumo tersebut.</p> <p>Kemudian dipertegas oleh pernyataan dari Anas Urbaningrum di paragraf 2 yang menyayangkan keluarnya Prabukusumo dari Partai Demokrat jika alasan terkait dengan konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY. Paragraf 3 memuat pernyataan Anas yang menyatakan bahwa dirinya dan Partai</p>	<p>Lead : Mundurnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dari Partai Demokrat (PD) mengejutkan para petinggi parpol tersebut. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum, menyesalkan keputusan GBPH Prabukusumo tersebut. Meski begitu Anas mengaku tidak bisa menahannya untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat.</p> <p>Penutup : Dua poin kesepahaman lainnya adalah pemerintah tetap menghormati keistimewaan DIY dan sistem demokrasi harus diterapkan dalam pemilihan kepala daerah. “Semangatnya seperti itu. Tinggal bagaimana masing-masing pihak menerjemahkannya,” ujar Syarif.</p>	<p>Judul KELUARNYA GBPH PRABUKUSUMO DARI PD</p> <p>ANAS MENYESALKAN, TAPI MENGHORMATI</p> <p>Keyword Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyesalkan keputusan Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat jika alasannya terkait dengan konteks RUUK DIY.</p> <p>Karena RUUK DIY masih dalam proses yang relative awal dan belum ada kesimpulan apapun.</p> <p>Namun demikian Partai Demokrat tetap menghormati hak politik Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat.</p>

<p>untuk keluar dari Partai Demokrat sangat mengejutkan para petinggi Partai Demokrat.</p> <ul style="list-style-type: none"> Anas Urbaningrum Ketua Umum DPP Partai Demokrat (kepentingan narasumber ini adalah memberikan tanggapan mengenai mundurnya Gusti Prabu dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY mengingat bahwa narasumber ini merupakan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, dimana Prabukusumo bernaung, sehingga dinilai mempunyai kompetensi untuk memberikan tanggapan untuk mewakili Partai Demokrat atas pengunduran diri Prabukusumo dari Partai Demokrat) Syarif Hasan: 	<p>Demokrat tetap menghormati sikap Gusti Prabu yang memilih keluar dari partai. “Itu hak politik mas Prabu. Tentu kami harus menghormati. Kami bisa mengerti posisinya di dalam dinamika dan perdebatan gagasan tentang penyelenggaraan keistimewaan Yogya,” ujarnya.</p> <p>Jenis Wacana Penggambaran Prabukusumo oleh wartawan/redaktur:</p> <p><u>Dari judul :</u></p> <p>KELUARNYA GBPH PRABUKUSUMO DARI PD</p> <p>ANAS MENYESALKAN, TAPI MENGHORMATI</p> <p><u>Dari Lead :</u></p> <p>Mundurnya Gusti Bendoro Pangeran Haryo (GBPH) Prabukusumo dari Partai Demokrat (PD) mengejutkan para petinggi parpol tersebut. Bahkan Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum,</p>	<p><i>Placement</i> yang menyatakan Anas Urbaningrum menyayangkan keputusan Prabukusumo yang mundur dari Partai Demokrat, terdapat pada paragraf pertama (awal) tulisan, ini menunjukkan bahwa hal tersebut ingin ditonjolkan oleh wartawan.</p> <p><i>Placement</i> yang menyatakan sikap Anas Urbaningrum menyikapi keputusan Prabukusumo tersebut ditunjukkan pada paragraf 2 hingga 4, disini wartawan memberikan space yang cukup banyak, sehingga dapat disimpulkan bahwa sikap Anas Urbaningrum yang menyesalkan keputusan Prabukusumo untuk mundur dari Partai Demokrat ditonjolkan oleh wartawan.</p> <p>Placement --- Paragraf, Halaman Depan (<i>Headline</i>) <i>Placement</i> mengenai citra positif Prabukusumo terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada berita edisi 10</p>	<p>Visual Image ada gambar GBPH Prabukusumo dan disebaliknya gambar Anas Urbaningrum.</p> <p>Catchprases</p> <ul style="list-style-type: none"> “mengejutkan para petinggi parpol.....” (paragraf 1). Kata mengejutkan menunjukkan bahwa para petinggi parpol banar-benar terkejut atas keputusan Prabukusumo untuk mundur dan keluar dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Menurut Anas, GBPH Prabukusumo dalam posisi sulit (paragraf 4). Kata posisi sulit menunjukkan bahwa Prabukusumo sedang berada dalam kebimbangan, di satu sisi beliau merupakan keluarga Keraton Yogyakarta yang mempunyai integritas untuk membela keistimewaan Yogyakarta dan di sisi lain beliau merupakan Ketua DPD Partai Demokrat yang berpengaruh. Pernyataan Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgap)
---	---	--	--

<p>Sekretaris Sekretariat Gabungan (Setgap) Koalisi</p>	<p>menyesalkan keputusan GBPH Prabukusumo tersebut. Meski begitu Anas mengaku tidak bisa menahannya untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat.</p> <p>Narasumber 1 : Anas Urbaningrum</p> <ul style="list-style-type: none"> Anas Urbaningrum, menyesalkan keputusan GBPH Prabukusumo tersebut. Meski begitu Anas mengaku tidak bisa menahannya untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat (paragraf 1) “Jika alasan adik Sri Sultan Hamengku Buwono X keluar dari Partai Demokrat karena terkait konteks Rancangan Undang-Undang (RUU) Keistimewaan DIY, tentunya sangat disayangkan. Semestinya beliau tidak secepat itu, karena RUU Keistimewaan DIY sekarang masih proses yang relatif awal dan belum ada kesimpulan apapun. Rancangannya belum dikirim ke DPR” (paragraf 2) 	<p>Desember 2010 terdapat pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> Paragraf 1 (... <u>Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menyesalkan keputusan GBPH Prabukusumo.....</u> Meski begitu <u>Anas mengaku tidak bisa menahannya untuk mengundurkan diri dari Partai Demokrat)</u> Paragraf 3(...“ <u>Itu hak politik mas Prabu.</u> Tentu kami harus menghormati. Kami bisa mengerti kesulitan posisinya dalam dinamika dan perdebatan gagasan tentang penyelenggaraan keistimewaan Yogya,” Paragraf 4 (Menurut Anas, <u>GBPH Prabukusumo dalam posisi sulit.</u> Di satu sisi, ia bagian dari keluarga besar Kraton. Posisi itu tidak mudah untuk terlibat di dalam debat konsep, pikiran dan gagasan di keistimewaan Yogya yang ditata dan diselenggarakan dalam RUU.) 	<p>Koalisi, yaitu penggunaan kata ‘poin krusial’ yang berarti suatu hal yang penting.</p>
---	--	---	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Namun, Anas dan Partai Demokrat tetap menghormati sikap Gusti Prabu yang memilih keluar dari partai. “Itu hak politik mas Prabu. Tentu kami harus menghormati. Kami bisa mengerti posisinya di dalam dinamika dan perdebatan gagasan tentang penyelenggaraan keistimewaan Yogya,” ujarnya. (paragraf 3) • Menurut Anas, GBPH Prabukusumo dalam posisi sulit. Di satu sisi, ia bagian dari keluarga besar Kraton. Posisi itu tidak mudah untuk terlibat dalam debat konsep, pikiran dan gagasan di keistimewaan Yogya yang ditata dan diselenggarakan dalam RUU. (paragraf 4) 		
<p>Partai Demokrat yang diwakili oleh Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum DPP Partai Demokrat terkejut dan menyesalkan atas keputusan GBPH Prabukusumo yang keluar dari Partai Demokrat. Meskipun begitu, namun Anas dan Partai Demokrat tetap menghormati keputusan Prabukusumo.</p>		<p>Keputusan mundurnya Prabukusumo dari Partai Demokrat mengejutkan para petinggi parpol tersebut. Pihak Partai Demokrat yang diwakili Anas Urbaningrum selaku Ketua Umum PD sangat menyayangkan keputusan Prabukusumo tersebut. Namun Anas dan Partai Demokrat menghormati sikap Prabukusumo tersebut, sebab itu merupakan hak politik dari Prabukusumo.</p>	
<p>KR melihat Partai Demokrat terkejut dengan keputusan Prabukusumo untuk mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat sekaligus keluar dari keanggotannya di Partai Demokrat. Selain itu Partai Demokrat juga menyayangkan sikap Prabukusumo tersebut jika alasannya terkait dengan RUUK DIY. Namun demikian Partai Demokrat tetap menghormati keputusan Prabukusumo tersebut.</p>			

ANGELINA SONDAKH GANTIKAN PRABUKUSUMO

Sejumlah Kader PD DIY Kecewa

ANALISIS SELEKSI		ANALISIS PENONJOLAN	
STRUKTUR SKRIPTUAL	STRUKTUR TEMATIS	STRUKTUR SINTAKSIS	STRUKTUR RETORIS
<p>Objek Wacana : Angelina Sondakh ditunjuk oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat untuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY.</p> <p>Pelibat Wacana : Angelina Sondakh</p> <p>Pelantun Wacana :</p> <ul style="list-style-type: none"> Wartawan kepentingan wartawan ini untuk memberikan informasi kepada khalayak bahwa Angelina Sondakh menggantikan kedudukan Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat DIY. 	<p>Tema yang diangkat dalam berita ini: <u>Angelina Sondakh menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah Provinsi DIY.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 1, 2 dan 6. Paragraf 1 dan 2 yang menyebutkan bahwa Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat menunjuk Angelina Sondakh menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</p> <p>Paragraf 6 memuat pernyataan dari</p>	<p>Lead : Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat menunjuk Angelina Sondakh menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</p> <p>Penutup : Perasaan kecewa terkait keputusan DPP PD diungkapkan Pongky Arwend, Wakil Sekretaris Bidang Politik DPD PD DIY. menurutnya secara pribadi ia tidak permasalahan dengan Angelina Sondakh. Namun ia</p>	<p>Judul ANGELINA SONDAKH GANTIKAN PRABUKUSUMO</p> <p>Sejumlah Kader PD DIY Kecewa</p> <p>Keyword Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat menunjuk Angelina Sondakh menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). (paragraf 1)</p> <p>Pergantian pejabat ini sempat membuat</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Saan Mustopa (Wakil Sekretaris Jendral Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat) <p>kepentingan dari narasumber ini adalah menyampaikan keputusan dari Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai Demokrat bahwa Angelina Sondakh akan menggantikan Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sukedi (Wakil Ketua I DPD Demokrat DIY) narasumber ini digunakan oleh SKH Kedaulatan Rakyat dengan alasan Sukedi merupakan Wakil Ketua I DPD Demokrat DIY yang dinilai mempunyai kompeten untuk menjelaskan bagaimana respon dari kader Partai Demokrat DIY atas keputusan ditunjuknya Angelina Sondakh untuk menggantikan posisi Prabukusumo. • Angelina Sondakh (Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY yang baru.) 	<p>Angelina Sondakh yang menyatakan siap mengemban tugas sementara ini meski ada penolakan dari beberapa kader Demokrat yang kecewa.</p> <p><u>Tanggapan para kader PD DIY terkait ditunjuknya Angelina Sondakh untuk menggantikan posisi Prabukusumo di DPD PD DIY.</u></p> <p>Tampak pada paragraf 4, 7 dan 8. Paragraf 4 memuat pernyataan dari Sukedi,Wakil Ketua I DPD Demokrat DIY yang menyatakan bahwa pergantian pejabat ini sempat membuat sejumlah kader kecewa. “Namun, sekarang semua pengurus menerimanya karena merupakan keputusan dari DPP yang harus ditaati,” kata Sukedi. Kemudian paragraf 7 memuat pernyataan dari Agus Bastian, Ketua DPD Partai Demokrat DIY,yang mengaku menerima keputusan DPP yang menunjuk Angelina Sondakh sebagai Plt Ketua DPD PD DIY. Di paragraf 8 memuat pernyataan dari Pongky Arwend, Wakil Sekretaris</p>	<p>menyesalkan tidak adanya komunikasi dari DPP kepada DPD PD DIY. Pongky mengaku akan tetap melawan keputusan DPP PD yang tidak memperhatikan aspirasi DPD PD DIY.</p> <p><i>Placement</i> yang menyatakan bahwa Angelina Sondakh ditunjuk untuk menggantikan posisi Prabukusumo di Partai Demokrat terdapat pada judul serta paragraf 1 dan 2 diawal tulisan, ini menunjukkan bahwa hal tersebut ingin ditonjolkan oleh wartawan. Sedangkan placement yang menyatakan kekecewaan kader Partai Demokrat dengan ditunjuknya Angelina Sondakh untuk menggantikan Prabukusumo ditunjukkan pada judul yang dipertebal serta paragraf 4 dan 8(paragraf penutup), disini wartawan memberikan space yang cukup strategis untuk pernyataan kekecewaan kader Partai Demokrat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersbut juga ingin ditonjolkan oleh</p>	<p>sejumlah kader kecewa. (paragraf 4)</p> <p>Keputusan DPP PD tersebut tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kader DPD PD dan tidak memperhatikan aspirasi DPD Partai Demokrat.</p> <p>Catchprases</p> <ul style="list-style-type: none"> • tidak akan berpengaruh terhadap <u>konsolidasi</u> internal partai (paragraf 3), kata konsolidasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (1) perbuatan (hal dsb) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dsb); (2) peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Dalam hal ini kata konsolidasi internal dapat diartikan sebagai hubungan atau pesatuan di dalam partai. • PD DIY hingga saat ini masih <u>solid</u> (paragraf 3), kata solid berarti kuat atau kukuh,. Dalam
--	--	--	--

<ul style="list-style-type: none"> • Agus Bastian (Wakil Ketua DPD Partai Demokrat DIY) • Pongky Arwend (Wakil Sekretaris Bidang Politik DPD PD DIY) 	<p>Bidang Politik DPD PD DIY yang menyatakan kecewa terkait keputusan DPP PD. Menurutnya secara pribadi ia tidak permasalahan dengan Angelina Sondakh. Namun ia menyesalkan tidak adanya komunikasi dari DPP kepada DPD PD DIY.</p> <p>Pongky mengaku akan tetap melawan keputusan DPP PD yang tidak memperhatikan aspirasi DPD PD DIY.</p> <p>Jenis Wacana Penggambaran Prabukusumo oleh wartawan/redaktur:</p> <p><u>Dari judul :</u></p> <p>ANGELINA SONDAKH GANTIKAN PRABUKUSUMO</p> <p>Sejumlah Kader PD DIY Kecewa</p> <p><u>Dari Lead :</u></p> <p>Dewan Pimpinan Pusat(DPP) Partai</p>	<p>wartawan.</p> <p>Placement --- Paragraf, Halaman Depan (<i>Headline</i>)</p> <p><i>Placement</i> mengenai citra positif Prabukusumo terkait pengunduran dirinya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY pada berita edisi 13 Desember 2010 terdapat pada: Paragraf 4 (<u>pergantian pejabat ini sempat membuat sejumlah kader kecewa.</u> “Namun <u>sekarang semua pengurus menerimanya karena merupakan keputusan dari DPP yang harus ditaati.</u>” kata Sukedi) Pernyataan Sukedi tersebut menunjukkan bahwa adanya keterpaksaan untu menerima Angelina Sondakh sebagai pengganti Prabukusumo di PD DIY, namun karena hal tersebut merupakan keputusan partai sehingga pada kader PD DIY akhirnya menerima keputusan tersebut.</p>	<p>berita ini dapat diartikan bahwa PD DIY tetap kuat/kukuh meski ditinggalkan oleh Prabukusumo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • pergantian pejabat ini sempat Angelina Sondakh yang menyatakan siap <u>mengemban</u> tugas sementara (paragraf 6).Kata mengemban berarti melaksanakan (tugas, cita-cita, kewajiban, dsb). • (1) perbuatan (hal dsb) memperteguh atau memperkuat (perhubungan, persatuan, dsb); (2) peleburan dua perusahaan atau lebih menjadi satu perusahaan. Dalam hal ini kata konsolidasi internal dapat diartikan sebagai hubungan atau pesatuan di dalam partai. • PD DIY hingga saat ini masih solid (paragraf 3), kata solid berarti kuat atau kukuh,. Dalam berita ini dapat diartikan bahwa PD DIY tetap kuat/kukuh meski ditinggalkan oleh Prabukusumo.
--	--	--	--

	<p>Demokrat menunjuk Angelina Sondakh menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).</p> <p>Narasumber 1 : Saan Mustopa</p> <p>Menurut Saan, mundurnya Gusti Prabukusumo tidak akan berpengaruh terhadap konsolidasi internal partai. Saan menegaskan bahwa PD DIY hingga saat ini masih solid. (paragraf 3)</p> <p>Narasumber 2 : Sukedi</p> <p>....pergantian pejabat ini sempat membuat sejumlah kader kecewa. “Namun, sekarang semua pengurus menerimanya karena merupakan keputusan dari DPP yang harus</p>		<ul style="list-style-type: none"> • <u>pergantian pejabat ini sempat</u> Angelina Sondakh yang menyatakan siap <u>mengemban</u> tugas sementara (paragraf 6). Kata mengemban berarti melaksanakan (tugas, cita-cita, kewajiban, dsb).
--	--	--	---

	ditaati” (paragraf 4)		
<p>Partai Demokrat menunjuk Angelina Sondakh untuk menggantikan Prabukusumo yang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi DIY.</p> <p>Namun, beberapa kader Partai Demokrat Provinsi DIY kecewa atas pergantian tersebut, sebab tidak ada komunikasi terlebih dahulu antara Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dengan DPD PD DIY.</p>		<p>SKH Kedaulatan Rakyat ingin menunjukkan bahwa keputusan DPP Partai Demokrat yang menunjuk Angelina Sondakh untuk menggantikan jabatan Prabukusumo di DPD Partai Demokrat DIY membuat beberapa kader Partai Demokrat DPD DIY kecewa.</p> <p>Namun akhirnya mereka(kader PD DIY) menerima keputusan tersebut karena merupakan keputusan dari DPP yang harus ditaati.</p>	
<p>Penunjukan Angelina Sondakh menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD DIY menggantikan GBPH Prabukusumo yang mengundurkan diri, sempat membuat sejumlah kader Partai Demokrat kecewa. Kekecewaan itu dikarenakan pengambilan keputusan tersebut tidak dikomunikasikan terlebih dahulu dengan kader Partai Demokrat DPD DIY dan tidak memperhatikan aspirasi kader.</p> <p>Namun akhirnya semua pengurus menerimanya karena merupakan keputusan dari DPP yang harus ditaati.</p>			

Hasil Wawancara dengan Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat (Bapak Adhisupo), pada 18 April 2012 pukul 20.00 WIB di kantor SKH Kedaulatan Rakyat.

Menurut bapak dengan menulis berita tentang Gusti Prabu bagaimana pendapat anda?

Jadi saya semakin tahu sikap Gusti Prabu terhadap perkembangan RUU Keisimewaan, dia bersikukuh bahwa partai politik itu bukan tujuan dia tapi bagaimana keistimewaan DIY itu tetap bertahan dan berkembang, artinya ya seperti sekarang kan ya seperti yang akan dijadikan undang-undang penuh dengan perjuangan.

Menurut bapak apakah ada faktor lain yang mendasari GP mundur dari PD selain karena RUUK? mungkin apakah ada dorongan dari kerabat keraton? Atau bahkan pencitraan?

Kalau dorongan dari kerabat keraton saya kira nggak, apalagi pencitraan. Tapi dia (GBPH Prabukusumo) mempunyai daya tawar untuk bersikap bahwa keraton itu bagian dari kehidupan dari seorang Gusti Prabu. Karena dia itu merasa sudah ikut berjuang dalam PD tidak ada semacam katakan balas budi atau apa tapi dalam tanda petik, jadi mereka kecewa, GP kecewa akumulasi kekecewaan, kecewa yang menumpuk. Karena dua keraton diobok-obok, keistimewaan diganggu, diusik. Kalau orang jowo bilang kemropok, kempropok banget lah. Gusti Prabu itu orangnya sederhana dan kalem. Dia juga bisa melihat kedepan, setelah keistimewaan itu diobok-obok kemudian dia tahu arahnya itu kemana, arahnya PD itu kemana, arahnya SBY itu kemana... kira-kira arahnya kemana pak? Ya tetap akan mengganggu keistimewaan DIY, tapi dengan perjuangan Gusti Prabu tapi tidak sendirian ya Sultan juga berperan besar.

Apakah sikap Gusti Prabu mundur dari PD ini merupakan rangkaian/masih terkait dengan tidak bersedianya Sultan untuk dicalonkan kembali sebagai gubernur.

Ya ini masih ada hubungannya dengan itu, karena yang tidak terima itu kan malah saudara-saudaranya termasuk GP soalnya haknya, haknya sebagai sultan.

Selama menjabat sebagai Ketua DPD PD, apa prestasi yang sudah diberikan GP kepada PD?

Antara lain kemenangan pada pemilu 2009, di DIY itu Partai Demokrat itu menang karena nama Gusti Prabu dan Keraton, coba kalau dia tidak membawa keraton, belum tentu, itu karena Gusti

Prabu. Gusti Prabu sendiri mengaku, saya itu sudah berjuang untuk Partai Demokrat tapi tidak dihargailah begitu, kira-kira begitu.

Apakah bapak mengenal Gusti Prabu secara pribadi?

Ya kenal secara pribadi, karena saya sering ke rumah beliau. Dan dia juga punya kesayangan ayam, okeh-okehan lah. Saya sebagai wartawan kan bertugas untuk meliput semacam itu.

Diluar konteks pengunduran diri GBPH Prabukusumo, bagaimana sosok Gusti Prabu menurut anda? Apakah anda mengenal beliau secara pribadi?

Dan dia sangat familiar, dia bukan orang yang meletakkan dirinya sebagai priyayi. Dia sering menyapa saya duluan di mana saja. Ya kenal secara pribadi, karena saya sering ke rumah beliau. Dan dia juga punya kesayangan ayam, dan okeh-okehanlah. Saya sebagai wartawan kan bertugas untuk meliput semacam itu.

Menurut bapak apakah mundurnya GP dari PD akan membawa dampak buruk bagi PD?

Ya berpengaruh, pengaruhnya dapat dilihat nanti pada pemilu berikutnya apakah bisa menang lagi atau tidak. Gusti Prabu lebih berwibawa mundur dari Partai Demokrat ketimbang dia (Gusti Prabu) masih sebagai Ketua Partai Demokrat.

Seberapa penting KR memberitakan Gusti Prabu?

Beliau termasuk tokoh, jadi punya nilai. Nilai beritanya yaitu sebagai tokoh Keraton Ngayogyakarta, sebagai adik sultan yang menjabat sebagai Gubernur di DIY, dan beliau juga sebagai penggemar okeh-okehan. Dan berita KR itu dijadikan sebagai acuan masyarakat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Jogja, sehingga sebagai koran yang paling banyak dibaca masyarakat di Jogja mungkin apa yang disampaikan di KR menjadi informasi yang penting karena banyak orang yang baca. Pemerintah, partai politik maupun masyarakat yang berkaitan dengan keistimewaan tentu tidak bisa mengabaikan, mesti akan memperhatikan apa yang diberitakan oleh KR.

Apakah ada keterkaitan antara KR dan Keraton?

Ya ada pasti, KR itu identik dengan Jogja, Jogja itu identik dengan keraton, identik dengan budaya, jadi tidak dapat dipisahkan antara keraton, KR, masyarakat jogja. Jadi kalo keraton terusik ya tentu saja media terutama KR itu juga terusik dan akan memberitakan terdepan. KR itu selalu dapat porsi, tapi bukan karena kedekatan ato apa lho. Tapi kedekatan sejarah juga.

Kedekatan sejarahnya itu seperti apa? Kedekatan secara historis saja, KR kan punya sejarah panjang, berdiri sejak proklamasi. Sultan HB IX itu kan pejuang, selalu ada berita Sri Sultan bertemu dengan orang biasa, dsb.

Apakah ada pengaruh objektivitas KR dengan Keraton, misalnya ada sesuatu yang tidak baik ttg keraton lalu KR menutup2i untuk tidak memberitakannya?

Kalo KR itu tidak menutup-nutupi tapi punya semacam prinsip, “ngono yo ngono”, nek dijiwit loro ki yo aja njiwit. Nah klo ada sesuatu hal itu tidak ditutup-tutupi, tapi bagaimana KR itu mengemas berita sehingga misalnya dia itu mengrikik dia itu tidak terasa, tidak sakit hati. Ya sebetulnya kalo orang yang memahami jane yo nylekit, tapi dikemas dengan bahasa yang halus. KR itu tetap independent, kalo misalnya ada berita yang bagaimana itu tidak ditutupi tapi diungkapkan dengan bahasa yang halus.

Adakah kebijakan redaksi mengenai kasus ini?

KR sejak awal merupakan Korannya Jogja, Koran yang lahir dan dibesarkan oleh rakyat Jogja. Dengan tetap menjunjung tinggi Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas yang pertama adalah kepentingan rakyat dan negara Indonesia, jadi pedoman-pedoman beritanya seperti itu. Bila disempitkan lagi ke filosofi Jawa yaitu bermanfaat bagi orang lain, KR pun berusaha agar berita-berita yang disajikan bermanfaat bagi pembacanya. Nah. Gusti Prabu ini kan termasuk tokoh di Jogja, jadi punya nilai. Nilai beritanya yaitu sebagai tokoh Keraton Ngayogyakarta, sebagai adik sultan yang menjabat sebagai Gubernur di DIY, dan beliau juga sebagai penggemar oceh-ocehan. Dan berita KR itu dijadikan sebagai acuan masyarakat terhadap setiap perkembangan yang terjadi di Jogja, sehingga sebagai koran yang paling banyak dibaca di Jogja mungkin apa yang disampaikan di KR menjadi informasi yang penting karena banyak orang yang baca. Pemerintah, partai politik maupun masyarakat yang berkaitan dengan keistimewaan tentu tidak bisa mengabaikan, mesti akan memperhatikan apa yang diberitakan oleh KR.

Proses produksi berita di KR.

Setiap hari reporter rapat kira-kira jam 7-8 dipimpin oleh redaksi pelaksana program untuk besok lusa, ke lapangan semua mengembangkan apa yang dia lihat, menganalisa apa yang dia terima, wartawan itu harus bisa menganalisis. orang berkata demikian biasanya kan bersayap dan harus dikembangkan kemudian cari narasumber lain yang masih berkaitan. Setelah dari lapangan kemudian wartawan kembali kembali ke kantor.

Narasumber?

Narasumber bisa ditentukan saat rapat redaksi atau biasanya wartawan sendiri sudah tau dia harus menghubungi siapa untuk dijadikan narasumber kemudian dibicarakan dalam rapat redaksi lha nanti klo ada yang kurang rapat redaksi akan mengusulkan narasumber.

Yang menentukan suatu isu diangkat di KR?

Semua bisa menentukan, reporter bisa menentukan, redpel bisa menentukan, wapemred juga bisa, pemred juga bisa menentukan. Penentuan isu itu berdasarkan nilai analisa dan pentingnya isu itu diketahui masyarakat Jogja misalnya ke depan jika dikembangkan akan seperti ini.

Menjadi wartawan sejak tahun 1972.

Yang menentukan judul?

Wartawan itu mengumpulkan berita sudah jadi, sudah ada teksnya, sudah ada judulnya, sudah ada leadnya. Namun tidak semua judul dari reporter, nah reporter itu juga termasuk editor untuk mengedit beritanya sendiri kemudian berita tersebut diserahkan ke redaktur kemudian diedit kembali oleh redaktur yang mengedit bisa mengubah lead, yang fungsinya untuk menarik pembaca dan melengkapi 5W1H. Gak selalu judul yang ditulis reporter itu digunakan, bisa diubah oleh redaktur, tapi gak hanya judul lead juga bisa diubah.

Panjang pendek berita?

Redaktur tidak menentukan panjang pendek berita, tapi dibuat sesingkat-singkatnya tapi kalo panjang juga bisa, kita juga tidak tau apakah berita kita untuk headline atau tidak, tapi juga harus panjang jadi nanti kalo dijadikan headline tidak perlu mencari tambahan lagi. Reporter juga harus punya feeling tentang panjang pendek berita.

Apakah ada mekanisme control?

Ada, mekanisme control bahasa, control isi. Biasanya dilakukan oleh redaksi, kalo control bahasa nanti ada redaktur bahasa. Nanti dia membetulkan kalo ada kesalahan nama ato istilah-istilah apa. Ada control tata bahasa, control etika.

Persiapan khusus sebelum melakukan peliputan?

Wartawan harus pandai menggorek sumber berita, kalau narasumber berita menolak ya bagaimana pandai-pandai wartawan bagaimana caranya lah supaya si narasumber ngomong. Jadi sebelum wawancara buat sebisa mungkin kenal sama si narasumber, sekarang kan lebih mudah dengan mencari di internet. Untuk mempermudah dalam wawancara.

Menurut bapak bagaimana citra GP setelah mundur dari PD?

Ya bagus sekali dan berhasil dalam perjuangan, dan dia juga berhasil mempengaruhi yang lain walaupun tidak dia minta, sampai beberapa kader juga mengundurkan diri sebagai kader Partai Demokrat.

Hasil Wawancara dengan Redaktur Pelaksana (Bapak Hudhono), 19 April 2012 pukul 16.00 WIB di kantor SKH Kedaulatan Rakyat

Terkait dengan visi dan misi SKH Kedaulatan Rakyat bagaimana penerapannya di lapangan?

Saya kira semua wartawan/reporter harus memahami visi dan misi KR sehingga mereka tidak kebingungan dalam menentukan sikap terkait dengan pemberitaan bagaimana sikap KR terhadap suatu persoalan. Kalau mereka tidak memahami bagaimana mengemas berita itu justru persoalan akan meluas, tidak memberi solusi malah merambah kemana-mana lha ini kan berarti wartawan tersebut tidak memahami betul visi dan misi KR. Kalau visi kan jauh ke dapan, kalau misi kan bisa dicapai dalam jangka pendek, jangka panjang dan menengah. Pers KR jangan sampai terlibat dalam suatu konflik, beberapa media sangat terlihat mereka sudah memasuki konflik dan tidak kemudian bagaimana mencari solusi. Okey lah itu untuk beberapa media layak jual, oh itu yang berbau konflik pasti menarik dan sebagainya. tapi kalau terus menerus seperti itu malah harus dipertanyakan ini visi misi pers/perusahaan itu apa sih sesungguhnya apakah memang membuat masyarakat risau atau tidak tenteram. Nah KR tidak seperti itu, KR itu kalau bisa justru menyelesaikan konflik bukan malah sebaliknya ngompor-ngompori, membesar besarkan sesuatu yang sebenarnya tidak besar. Maka wartawan harus paham betul dengan visi dan misi KR.

Bagaimana karakter pemberitaan di SKH Kedaulatan Rakyat terkait dengan prinsip yang diusung SKH Kedaulatan Rakyat?

Saya kira kalau prinsip-prinsip secara umum tidak jauh beda dengan teori pers yang berlaku saat ini, misalnya soal akurasi pemberitaan, kebertimbangan, kemudian yang jauh lebih penting dan acap kali disepelekan oleh wartawan adalah verifikasi. ini yang kita tekan kan, semua pemberitaan harus ada verifikasi tidak kemudian setiap ada pemberitaan/peristiwa langsung kita muat apa adanya, gak seperti itu. Jadi yang namanya objektivitas itu tidak apa adanya, sebenarnya bukan seperti apa adanya tetapi proses untuk mendapatkan berita secara profesional, rambu-rambu itu sudah ditempuh, misalnya verifikasi terhadap data. Kalau pun kemudian itu hasilnya bermasalah tapi rambu-rambu jurnalistik itu sudah dilalui itu akan terbebas dari jeratan hukum ini penting

banget. Jadi lebih pada prosesnya bukan pada hasilnya. Objektivitas itu terkait dengan prosesnya, bagaimana proses jurnalistik itu berjalan.

Apakah keterdekatan wartawan dengan narasumber akan memperngaruhi objektivitas?

Bisa iya bisa juga tidak. Kalau secara real mungkin iya, artinya bagi orang-orang yang mempertahankan independensi mungkin tidak. Misalnya sadar betul klo saya itu jurnalis profesional, salah satu unsur profesional adalah independen. Maka sedekat apa saya dekat dengan narasumber saya harus menempatkan diri secara profesional. Saya tidak bisa kemudian hanya menjadi corong narasumber. Biasanya penyakitnya ketika wartawan sudah sangat dekat dengan narasumber bahkan keluarganya, maka akan ada timbul rasa yang namanya ewuh pekewuh, kalau sudah pekewuh pekuwuh maka akan repot wartawan. Katakanlah narasumber itu korupsi saat menjadi tidak fair to, ditutup-tutupi dan sebagainya, kalau sampai seperti itu berarti si wartawan menjadi tidak independen to? Nah kalau di KR mendapati yang demikian maka akan saya ganti, saya ganti dengan wartawan lain yang tidak ada hambatan psikologis. Misalnya mereka yang tidak pernah ngepos di Kraton, itu orang-orang yang baru yang tidak punya beban psikologis apapun berani mengungkap secara apa adanya tanpa ada rasa ewuh pekewuh itu tadi. Dalam beberapa kasus memang wartawan yang dekat dengan narasumber itu ya menjadi bermasalah ketika harus menuliskan hal-hal yang sifatnya pro ato negatif. Jadi kita sudah mengantisipasi terhadap hal ini, prinsipnya independen. Wartawan harus independen.tidak boleh terpengaruh dengan narasumber. Kalau dia gak mampu independen ya udah nyingkir saja, bilang saja kalau saya sudah dekat narasumber. Nanti bisa saya rolling sementara atau permanen.

Dilihat dari sejarahnya SKH Kedaulatan Rakyat apakah apakah ada hubungan dengan Keraton Yogyakarta?

Pasti ada, bisa jadi sedikit banyak mungkin ada rasa pekewuh. Sampai sejauh ini memang tidak ada kekuatan yang betul-betul signifikan untuk menekan KR, pertama secara perusahaan tidak ada hubungan apapun. Gusti Prabu tidak punya saham di KR, tapi di media lain beliau punya. Cuma kita tetep menjunjung kebudayaan lokal, ya memang layak untuk dijadikan panutan misalnya istilah “ngono yo ngono ning ojo ngono” kan sebenarnya sangat bagus. KR memang mengembangk an pers yang santun, pers yang mengembangkan budaya lokal budaya jawanya, terutama budaya jogjanya. Orang Jogja itu tidak perlu ditampar gitu, sudah terasa dengan disindir

aja sudah terasa kadang lebih sakit daripada ditampar. Gak pernah ada di budaya manapun. Ini sudah mengena banget, artinya untuk menjatuhkan atau membuat orang sakit tidak harus dengan menendang, menampar dan sebagainya dengan menyentil aja sudah sakit luar biasa, itu kan yang tidak ada di daerah lain dan KR mengembangkan itu. Sebenarnya mirip dengan pers pancasila.

Kalau keredaksian di KR itu seperti apa, terkait dengan mekanisme keputusan terkait isu pemberitaan?

Saya kira kan semua ada penanggung jawab, yang namanya media massa tanggung jawabnya kan memang spesifik tanggung jawabnya ada di pemimpin redaksi, bukan di pribadi bukan di wartawannya, bukan di redaktornya tetapi di pemimpin redaksi. Maka kalau berita ternyata nanti bermasalah atau dipersoalkan secara hukum maka nanti yang akan bertanggung jawab pemimpin redaksi, bukan orang yang nulis, bukan redaktornya yang mengoreksi, bukan pula korektornya maka terkait dengan hal itu maka dalam setiap pengambilan keputusan redaksi maka libatkanlah pemimpin redaksi meskipun dalam kenyataannya pemimpin redaksi itu sangat sibuk tapi dia harus tau apa yang hendak dimuat besok sehingga dalam pemilihan isu apakah ini layak dimuat atau tidak kita diskusi dengan pemimpin redaksi maka tiap hari pemimpin redaksi juga harus ada di tempat saat rapat redaksi, ini tadi siang juga ada pemimpin redaksi, malam juga ada pemimpin redaksi.

Malam itu kan kita meeting untuk menentukan ini kira-kira gimana kita muat tidak, kita mau ambil foto yang seperti ini etis tidak, bahwa kita langganan mungkin Antara , kita langganan AP, kita langganan media manapun itu belum tentu kita ambil semuanya kan. Kalau memang itu dari ukuran kelayakan tidak memenuhi kualifikasi ya tidak akan kita ambil, biarlah koran lain ambil tidak masalah. Kita punya ukuran-ukuran, standar moral.

Yang menentukan suatu isu akan diangkat atau tidak itu siapa?

Dari diskusi redaktur dan wartawan, untuk hal hal yang sifatnya relatif sederhana saya kira kita sudah mampu menyaring diri kita sendiri untuk menyaring memfilter apakah ini layak ato tidak kita sudah bisa melakukan sendiri. Untuk isu-isu sensitive seperti tadi saya katakan misalnya isu SARA kita akan hati-hati banget, seperti soal isu etnis kita akan hati-hati seperti orang Thiong Hoa aatau keturunan Thiong Hoa di Jogja bagaimana kita nggrapnya sehingga tidak menimbulkan sektarian.

Yang menentukan suatu berita menjadi headline /tidak itu siapa pak?

Lagi-lagi ya rapat redaksi.

Kalau wartawan sudah nulis berita apakah judul dari berita bisa di ganti? Kalau iya siapa yang biasa mengganti?

Oiya, biasanya dilakukan oleh redaktur/editor. Tapi memang diterapkan semua wartawan harus bikin judul itu untuk memudahkan pula editor dalam mengoreksi atau editing. Sangat mungkin pula judul yang dibikin si wartawan kita rombak total, karena mungkin wartawan lebih tertarik pada judul tertentu yang notabene itu sudah kusam sebenarnya karena dia tidak pernah dengar saja.

Yang mempengaruhi panjang pendek berita?

Saya kira itu sangat relatif, yang jelas media kita kan dibatasi dengan space dan kita pun bisa mengukur dalam satu halaman itu untuk berita-berita konferensial mungkin sekitar 8-10 dengan fotonya sehingga tidak mungkin wartawan membuat berita di atas 3000 karakter. Biasanya 2500 karakter-1500an.

Terkait dengan topik yang saya ambil tentang pengunduran diri Prabu Kusumo dari Partai Demokrat, bagaimana pendapat sebagai redaksi KR apakah ada faktor lain selain keistimewaan?

Selama ini kalau yang terlihat memang publik akan gampang sekali menyimpulkan bahwa itu terkait dengan keistimewaan, namun apakah benar hanya itu, media juga belum bisa mengungkap meskipun menduga-duga boleh saja karena memang kita melihat ada logika yang masuk akal menurut saya. Bahwa sekarang yang namanya Partai Demokrat sedang merosot, dimana-mana merosot banyak politisi yang tersandung kasus korupsi. Bahkan Ketua Umumnya juga begitu; sehingga sekarang ini ada pilihan-pilihan kalau misalnya ada partai pro rakyat yang lebih baik kenapa tidak kemudian pindah. Saya sendiri juga tidak ngerti pindahnya mau kemana, tapi pilihan-pilihan itu saya kira masih berlaku, coba aja nanti lihat 2014 dia akan pindah kemana sebenarnya itu sudah bisa terdeteksi. Cuma kalo kita mau menyimpulkan masih belum bisa. Jadi ada kemungkinan ada hal-hal yang belum terungkap di media misalnya karena popularitas Partai

Demokrat sudah demikian merosot sehingga tidak menguntungkan untuk berlama-lama di Demokrat, saya juga gak yakin kalau Gusti Prabu itu mundur hanya karena RUUK saya juga tidak begitu yakin. Karena ada faktor lain yang lebih menjanjikan bahasa kasarnya kutu loncat, mana yang menguntungkan itu yang dituju. Yang namanya politikus kan seperti itu, kalau disana lebih ranum lebih manis ngapain bertahan di partai ini yang sudah bobrok.

Kalo mundurnya GP apakah terkait dengan bobroknya Partai Demokrat?

Ya saya kira tetap ada faktor itu, ada faktor “Demokrat”nya bukan sekedar RUUK cuman Gusti Prabu kan tidak mau bilang dan kalau tidak mau bilang bukan berarti tidak ada kan. Dan media tidak bisa memaksa narasumber untuk ngomong juga kan? Namun mestinya ada frame yang bisa dibangun oleh media bahwa saat ini kalo orang punya peran, punya posisi di Demokrat kemudian dia pindah, dia mundur pasti ada apa-apanya kan, kemudian politik apa yang masuk akal dan ternyata partai itu sangat bobrok. Orang yang bertahan disitu mungkin punya saham yang jika ditinggalkan sangat eman-eman, wah saya sudah terlanjur kepalang basah di Demokrat kalo mau pergi ya saya rugi setengah mati, saya akan lebih untung jika tetap bertahan meskipun dengan hujatan dari masyarakat.